

DISRUPTIVE INNOVATION FOR GLOBAL COMPETITIVENESS: BLUE OCEAN BUSSINESS STRATEGY AND NEW PUBLIC MANAJEMENT STRATEGY IN A POSTMODERN PERSPEKTIVE

Yenny Marthalena¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: yennymarthalena.YM@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana *disruptive innovation for global competitiveness* membawa perubahan terhadap strategi perusahaan, salah satunya adalah *blue ocean* dan transformasi kebijakan birokrasi di era milenial melalui penerapan *New Public Management Strategy* berdasarkan perspektif posmodern. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel dari jurnal akuntansi dalam basis data elektronik (Elsevier, Emerald, Springer, dan Google Scholar). Kerangka konseptual terintegrasi yang dikembangkan yaitu Disrupsi akan menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi siapapun. Bagi manusia yang merayakan perubahan, disrupsi adalah masa depan. Namun, bagi mereka yang sudah nyaman dengan keadaan saat ini serta takut dengan adanya perubahan, mereka akan berpikir bahwa ini adalah awal dari kepunahan. Strategi *blue ocean* muncul akibat persaingan pasar yang semakin ketat, sehingga *blue oseau* mengajarkan kepada kita untuk bisa keluar dari persaingan. Kehadiran paradigma *New Public Management* diproyeksikan dapat memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan sektor publik. *New Public Management* menawarkan gagasannya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan transformasi spirit kinerja sektor swasta yang mengutamakan nilai efektivitas dan efisiensi. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Paradigma postmodern digunakan untuk kebangkitan kesadaran manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran emosi, spiritual, dan intelektual yang lebih tinggi.

Kata Kunci: *Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, New Public Management Strategy, Postmodern Perspective.*

I. PENDAHULUAN

Era 1990-an, Nokia menjadi raja dunia untuk produk telepon seluler dan pada akhirnya pudar, tidak jauh berbeda dengan kasus tahun 2000-an dimana masih kental di benak kita para pengguna *smartphone* harus menjadi saksi atas terlindasnya aplikasi Blackberry oleh Whatsapp, maupun jejaring sosial Friendster yang benar-benar tergantikan oleh Facebook.

Contoh di atas merupakan pembuktian mengenai fakta bahwa perubahan akan selalu terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia. Masyarakat dunia saat ini dihadapkan dengan fakta perubahan melalui peralihan, dimana saat peralihan terjadi eksistensi suatu kelompok/organisasi

yang tak siap dan menolak perubahan tersebut akhirnya terpinggirkan dengan sendirinya. Rhenald Kasali (2017) menyatakan bahwa perubahan yang terjadi diawali dengan hal kecil, sedemikian kecil sehingga terabaikan oleh mereka yang besar. Perubahan itu bahkan tidak terlihat, dan tiba-tiba begitu besar. Inilah karakter perubahan pada abad ke-21: Cepat, Mengejutkan, dan Memindahkan.

Disrupsi akan menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi siapapun, karena dunia telah berubah dari berbagai sisi yang dipengaruhi oleh revolusi teknologi, generasi (manusia) baru dan kebutuhan akan kecepatan yang luar biasa. Bagi masyarakat yang merayakan perubahan, disrupsi adalah masa depan. Namun, bagi mereka yang sudah nyaman dengan keadaan sekarang dan takut dengan perubahan, mereka akan berpikir bahwa ini adalah awal dari kepunahan (Rhenald Kasali, 2014).

Age of disruption dapat kita katakan sebagai era revolusi industri 4.0, yaitu *trend* peralihan ke digital *commerce*, *big data*, *robotic*, *artificial intelligence*, dsb. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020 dengan proyeksi nilai transaksi *e-commerce* mencapai 130 juta USD. Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 menunjukkan kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 4% dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 3,61%, dan tahun 2018 diperkirakan meningkat hingga 10%. Fakta yang fantastis ini membuktikan bahwa teknologi digital tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan pribadi perorangan maupun operasional organisasi, untuk memiliki daya saing yang paripurna mau tidak mau kepemilikan inovasi berbasis teknologi digital menjadi suatu yang tidak dapat tertunda. Dampak atas internet *things in our daily*, telah menjadikan dunia mendigital tanpa batas ruang dan waktu, serta menghadirkan disrupsi atau percepatan peralihan di berbagai aspek kehidupan manusia.

Teori Normalisasi yang merupakan teori berperspektif optimis (*cyber optimists*) memprediksi perkembangan teknologi informasi selalu berdampak positif dan dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat. Tokoh utama yang mewakili teori normalisasi adalah Resnick (1998). Menurut Resnick (1998), perbedaan tingkat antara pemilik akses internet dan yang tidak memiliki akses akan semakin menurun, setidaknya dalam masyarakat pos industri. Ekspektasi ini didasarkan pada fenomena semakin luasnya pemanfaatan digitalisasi, baik sebagai pusat layanan publik ataupun komersial. Tentu saja teori ini mendapat banyak kritik dari para ilmuwan lainnya.

Semakin ketatnya persaingan menimbulkan pemikiran untuk menerapkan strategi perusahaan yang dapat terhindar dari saling bersaing satu sama lain. Strategi *blue ocean* adalah suatu strategi yang diterapkan perusahaan bersama dengan alat dan kerangka kerjanya, untuk dapat menciptakan inovasi nilai, dimana perusahaan mampu menciptakan nilai yang baru bagi pelanggan, dan mampu menciptakan ruang pasar baru dimana tidak ada pesaing didalamnya (Abdillah, 2018).

Strategi *blue ocean* muncul akibat persaingan pasar yang semakin ketat, sehingga *blue ocean* mengajarkan kepada kita untuk bisa keluar dari persaingan. Salah satunya yaitu dengan melakukan inovasi nilai. Persaingan yang ketat tidak hanya mendorong manusia untuk menggunakan strategi *blue ocean*, akan tetapi mendorong negara untuk menerapkan strategi *New Publik Management*

(NPM). Sehingga Kebutuhan untuk melakukan transformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan adalah keniscayaan bagi perusahaan dan setiap individu untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan daya tahan serta dukungan organisasi yang solid untuk menyesuaikan diri di abad ke-21 ini, yang sangat cepat berubah dan membutuhkan teknologi terkini, kreatifitas, *networking* dan kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Hal ini tentu saja dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Dalam ilmu administrasi publik, kehadiran paradigma *New Public Management* diproyeksikan dapat memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan sektor publik. *New Public Management* menawarkan gagasannya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan transformasi spirit kinerja sektor swasta yang mengutamakan nilai efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks birokrasi Indonesia, peluang penerapan *New Public Management* cukup strategis mengingat adanya dukungan secara politik melalui kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi yang terus didengungkan pemerintah. Namun realitasnya, ternyata masih jauh dari harapan, karena terkendala dengan mental aparatur birokrasi, kultur kerja organisasi yang tidak efektif, model kepemimpinan yang kurang kreatif dan komitmen untuk melakukan perubahan sebagaimana diharapkan dalam reformasi birokrasi yang menjadi tuntutan publik.

Banyaknya permasalahan yang timbul saat ini, *New Public Management* dianggap dapat memberikan kontribusi untuk melakukan perubahan perbaikan untuk menggoyang organisasi publik yang tidur serta melayani dirinya sendiri melalui ide-ide dari sektor privat (Mahmudi, 2003). *New Public Management* mempunyai fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya, dalam artian bahwa NPM berusaha memperbaiki kinerja sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat guna meningkatkan kualitas layanan publik di era milenial.

Untuk menerapkan berbagai macam strategi bisnis termasuk *blue ocean*, dibutuhkan dukungan dari birokrasi di suatu negara. Saat ini *New Publik Management* mengharuskan birokrasi melakukan transformasi kebijakan salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Bahkan peraturan kementerian di bidang pendidikan pun saat ini mengarah pada penguasaan di bidang teknologi informasi. Sehingga, Kebutuhan untuk melakukan transformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan adalah keniscayaan bagi perusahaan dan setiap individu untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan daya tahan serta dukungan organisasi maupun birokrasi yang solid untuk menyesuaikan diri di abad ke-21. Bagi masyarakat yang merayakan perubahan, disrupsi adalah masa depan. Namun, bagi mereka yang sudah nyaman dengan keadaan sekarang dan takut dengan perubahan, mereka akan berpikir bahwa ini adalah awal dari kepunahan (Rhenald Kasali, 2014).

Realitas yang terjadi saat ini terhadap manajemen strategi diperspektif lebih mengarah pada praktik manajemen barat. Manajemen strategi dipandang kurang menyenangkan dan bahkan hanya merupakan produk kepentingan dari manajemen puncak (Levy, 2003). Khususnya di era digital saat ini, manusia semakin diperbudak dengan adanya teknologi yang dikembangkan. Berbagai macam aksi korporasi di berbagai perusahaan yaitu dengan adanya praktik akuisisi, perampingan,

spin-off, globalisasi, peningkatan pangsa pasar, teknologi baru dan inovatif, serta pengurangan biaya tenaga kerja melalui relokasi fasilitas manufaktur. Masing-masing strategi ini dibenarkan dalam hal peningkatan keuntungan, terlepas dari konsekuensinya terhadap manusia atau lingkungan (Chwastiak, M. & Young, J. Y, 2003). Permintaan pasar mendorong perusahaan secara agresif mengejar realisasi modal dan memaksimalkan laba yang diperoleh.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana *disruptive innovation for global competitiveness* membawa perubahan terhadap strategi perusahaan, salah satunya adalah *blue ocean* dan transformasi kebijakan di birokrasi di era milenial melalui penerapan *New Public Management*, dikaji melalui perspektif posmodern. Paradigma ini digunakan untuk menstimulasi (*to stimulate*) kebangkitan kesadaran manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran emosi, spiritual, dan intelektual yang lebih tinggi (Triyuwono, I, 2009: 215-220). Postmodern dapat menerima dan mengkombinasikan atau mensinergikan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Pemikiran yang berbeda dapat disatukan dalam bentuk sinergi. Misalnya, nilai-nilai maskulin disinergikan dengan nilai-nilai feminim (Hines, 1992).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur merupakan suatu metode dalam meninjau teori-teori yang ada melalui serangkaian tahapan untuk memastikan bahwa ketelitian dan transparansi yang tepat dibawa ke proses tinjauan literatur (Garza-Reyes, 2015). Tujuan utama dari tinjauan literatur adalah untuk mengidentifikasi kunci dari kontribusi ilmiah ke dalam bidang atau pertanyaan yang hasilnya akan didiskusikan dan disajikan secara deskriptif (Becheikh, Landry, & Amara, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan unit analisis berupa hasil penelitian dari artikel-artikel yang memiliki tema mengenai *Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, New Public Management Strategy, Postmodern Perspective*. Hal ini dilakukan untuk mencari dan menemukan publikasi yang relevan dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Basis data elektronik yang digunakan yaitu Elsevier (sciencedirect.com), Emerald (emeraldinsight.com), Springer (springerlink.com) dan Google Scholar. Pencarian dengan menggunakan berbagai macam basis data elektronik akan mengakibatkan penemuan artikel yang sama karena beberapa artikel tidak hanya dipublikasikan dalam satu basis data elektronik. Hal ini dapat berfungsi sebagai validasi untuk memastikan bahwa semua artikel yang relevan sudah disertakan dalam kriteria pencarian.

III. HASIL PEMBAHASAN

Disrupsi dan Revolusi Industri 4.0

Istilah disrupsi merujuk kepada perubahan yang mendasar atau fundamental. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen, profesor Administrasi Bisnis dari Universitas Harvard. Christensen menyebut disrupsi sebagai sebuah perubahan besar yang membuat industri tidak berjalan seperti biasa, umumnya karena penemuan teknologi. Perubahan

itu memunculkan pemain-pemain baru dan membuat pemain bisnis lama harus memikirkan ulang strategi berhadapan dengan era baru ini.

Perubahan besar atau fundamental tersebut sebenarnya bukan hal baru. Dalam sejarah peradaban manusia, kita setidaknya mengenal 4 disrupsi yang mengubah tatanan lama. Disrupsi pertama terjadi pada abad ke-18 dengan ditemukannya tenaga uap untuk mekanisasi produksi. Teknologi ini menggantikan kuda dengan kereta api sebagai alat transportasi, menggantikan tenaga kasar manusia dengan mesin-mesin untuk melipat gandakan produksi. Disrupsi kedua, dipicu oleh ditemukannya tenaga listrik. Teknologi ini membuat skala produksi bisa dibuat secara massal. Disrupsi ketiga, dimulai pasca Perang Dunia II, yang ditandai dengan kehadiran elektronika dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Saat ini kita mengarah kepada disrupsi generasi keempat yang dipicu oleh kehadiran internet dan dunia virtual.

Disrupsi generasi keempat ditandai oleh makin pentingnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), penggunaan robotika, internet untuk segala hal (*Internet of Things*), dunia virtual (*virtual reality/VR*), dan mesin cetak tiga dimensi. Jika bisnis perusahaan tidak beradaptasi dengan perubahan tersebut, perusahaan akan mati. Banyak sekali perusahaan yang semula dominan dan menguasai pasar, akan tetapi karena terlambat beradaptasi dengan perubahan, pada akhirnya mengalami pailit. Misalnya Kodak, yang sebelumnya menguasai pasar fotograf, karena lambat dalam mengadopsi teknologi fotograf digital, pada akhirnya bangkrut pada tahun 2012 karena kalah bersaing dengan perusahaan baru. Gejala ini terjadi dalam semua bisnis, mulai dari transportasi, perbankan, asuransi, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya.

Disrupsi bisa dilihat sebagai ancaman, tetapi bisa juga menjadi peluang. Perusahaan atau organisasi harus berpikir ke depan, dan berani melakukan perubahan untuk menghadapi era disrupsi. Rheinald Kasali (2017) menyatakan bahwa terdapat tiga hal untuk menghadapi era disrupsi. Pertama, organisasi tidak boleh berada di zona nyaman. Organisasi yang merasa sangat nyaman selalu berasumsi bahwa pelanggan mereka sudah sangat loyal. Padahal, ketika terjadi perubahan fundamental saat ini, perlu dilihat ulang apakah terjadi pergeseran segmen konsumen yang bisa jadi berkarakter lain dengan konsumen lama. Kedua, organisasi tidak boleh takut mematikan (kanibalisasi) produk sendiri dan membuat produk baru, jika produk lama tersebut tidak sesuai dengan perubahan. Cara ini mungkin terlihat ekstrim, tetapi harus dilakukan agar efektif dalam beradaptasi dengan perubahan. Ketiga, organisasi terus menerus membentuk ulang atau menciptakan inovasi dengan memodifikasi yang sudah ada dalam bentuk lain atau bahkan menciptakan hal baru. Tiga strategi tersebut akan membuat disrupsi bukan sebagai ancaman, melainkan justru peluang untuk mendapatkan keuntungan dan mengembangkan organisasi.

Disrupsi tidak hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga pada tenaga kerja. Perubahan teknologi membuat perubahan kebutuhan tenaga kerja. Banyak pekerjaan lama yang tidak dibutuhkan digantikan oleh pekerjaan dengan keahlian baru. Contoh terbaru, penggunaan *e-money* untuk pembayaran jalan tol hingga kasir. Perubahan ini membuat pekerjaan penjaga jalan tol dan kasir, tidak lagi dibutuhkan. Jutaan pekerja harus rela kehilangan pekerjaan akibat digantikan oleh *e-money*

Disrupsi tidak bisa dihindari. Agar bisa bertahan, organisasi harus berubah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pekerja. Di satu sisi, disrupsi berpotensi menghapus pekerjaan lama. Tetapi di sisi lain, disrupsi juga memunculkan kebutuhan akan keahlian baru. Pekerja yang menyesuaikan dengan perubahan tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Penggunaan *e-money* memang menghilangkan pekerjaan kasir, tetapi pada saat yang sama menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru di bidang IT, analisis dan pengolahan data.

Menurut Rhenald Kasali (2017), disrupsi harus dilihat sebagai tantangan dan bukan halangan. Di saat banyak bidang pekerjaan hilang, pada saat bersamaan kita juga menyaksikan bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang tak pernah kita kenal 10-20 tahun yang lalu. *Barista, blogger, web developer, apps creator/developer, smart chief listener, smart kettle manager, big data analyst, cyber troops, cyber psychologist, cyber patrol, forensic cyber crime specialist, smart animator, game developer, smart control room operator, medical sonographer, prosthodontist, crowd funding specialist, social entrepreneur, fashionista and ambassador, BIM Developer, Cloud computing services, cloud service specialist, Dog Whisperer, Drone operator* dan sebagainya. Disrupsi teknologi memang memberi tempat kepada teknologi, robotik, dan kecerdasan buatan untuk menggantikan manusia. Tapi ini bukan berarti kemudian pekerjaan manusia menjadi terkikis, yang berubah adalah jenis-jenis pekerjaan dan keahlian baru. Jika pekerja bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, tidak ada alasan untuk takut dengan disrupsi teknologi.

Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy (BOS) merupakan strategi dunia bisnis yang dipopulerkan oleh dua profesor manajemen W.Chan Kim dari Korea Selatan dan Renee Mauborgne dari Amerika Serikat. Teori-teorinya dianggap mampu merombak paradigma persaingan konvensional yang saling mematikan (*Red Ocean*). *Blue Ocean Strategy* mengajarkan bagaimana sebuah lembaga/perusahaan keluar dari persaingan dengan menciptakan inovasi nilai dan menjadikan persaingan tidak lagi relevan. Nilai-nilainya yang universal dapat dikembangkan ke bidang apapun termasuk bidang pendidikan (Chan Kim & Renee Mauborgne, 2010).

Dalam dunia bisnis, sejumlah alasan mendorong setiap perusahaan menciptakan ruang pasar baru. kemajuan teknologi yang sangat pesat secara substansial meningkatkan produktivitas industri dan memungkinkan perusahaan penghasil produk dan jasa. Ketika jumlah kompetitor meningkat dan pasokan melebihi permintaan maka monopoli pasar oleh perusahaan-persahaan tertentu yang selama ini terjadi semakin memudar. Akibatnya, komoditisasi produk dan jasa semakin cepat dan perang harga tidak dapat dihindarkan sehingga laba yang diperoleh menyusut. Satu-satunya cara memenangkan persaingan adalah berhenti bersaing dan beralih menjelajah *Blue Ocean* tersebut. Di dalamnya kompetisi dibuat tidak relevan karena aturan-aturan permainan baru akan dibentuk. Hal ini berbeda dengan *Red Ocean* dimana mengalahkan pesaing akan selalu menjadi hal yang penting.

Menciptakan *Blue Ocean* berpijak pada inovasi nilai, yaitu upaya mengejar diferensiasi sekaligus menekan biaya serendah mungkin secara bersamaan. Dengan inovasi nilai, perusahaan tidak fokus lagi untuk memenangkan persaingan, bahkan membuat persaingan antar perusahaan menjadi tidak relevan. Inovasi nilai bukanlah inovasi yang mengandalkan teknologi atau sekedar

mengedepankan futuristis sehingga membidik sesuatu yang yang belum siap diterima oleh pasar. Banyak pilihan strategis bagi perusahaan untuk mengejar deferensiasi maupun biaya yang lebih rendah dengan mengikuti prinsip-prinsip penciptaan Blue Ocean yang dikemukakan oleh Kim dan Mauborgne (2010) yaitu: Ada enam prinsip dalam strategi samudra biru terbagi menjadi ke dalam 2 klaster yaitu klaster perumusan strategi dan klaster eksekusi strategi. Klaster perumusan strategi terdiri dari 4 prinsip yaitu merekonstruksi batasan-batasan pasar, fokus pada gambaran besar bukan angka, menjangkau melampaui permintaan yang ada dan melakukan rangkaian strategi dengan tepat. Sementara klaster eksekusi strategi mencakup dua prinsip yaitu upaya mengatasi hambatan-hambatan organisasi dan mengintegrasikan eksekusi ke dalam strategi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Merekonstruksi Batasan-batasan Pasar

Untuk melepaskan diri dari *Red Ocean*, perusahaan harus mendobrak batasan-batasan umum mengenai cara mereka berkompetisi. Seorang manajer perlu mengkaji secara sistematis batasan-batasan tersebut dengan mencermati industri-industri alternatif, kelompok strategis, kelompok pembeli, penawaran produk dan jasa pelengkap, orientasi fungsional-emosional suatu industri dan mencermati waktu. Dengan berfikir melintasi dan melampaui batasan-batasan kompetisi seorang manajer dapat membuat langkah-langkah mengubah kondisi umum dan mampu mengkonstruksi batasan-batasan mapan yang ada di pasar.

2) Fokus kepada Gambaran Besar

Fokus kepada gambaran besar artinya setiap manager wajib memvisualisasikan strateginya dalam sebuah kanvas yang merangkum situasi terkini ruang pasar yang sudah dikenal serta posisi lembaga yang dipimpinnya. Dengan kanvas strategi tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang sedang jadi ajang kompetisi dalam produk dan jasa serta penawaran kompetitif apa yang ada di pasar. Rekayasa dalam kanvas strategi akan membantuk perusahaan/lembaga membuat lompatan baru yang fundamental dari pada hitungan-hitungan angka statistik semata. Dengan langkah ini lembaga diarahkan dari fokus ke pesaing ke alternatif, dari konsumen ke non-konsumen.

3) Menjangkau melampaui permintaan

Untuk menjangkau melampaui permintaan yang ada, perusahaan/lembaga harus menentang praktik konvensional tentang konsumen yaitu fokus pada konsumen yang ada dan mempertajam segmentasi dipihak pembeli. Manajer harus mengambil jalan berlawanan yaitu perlu melihat kepada non konsumen dan mengembangkan hal-hal yang belum dihargai oleh pembeli secara umum. Dunia non konsumen secara umum menawarkan peluang besar untuk menciptakan *Blue Ocean*, hanya sedikit perusahaan yang punya wawasan soal siapa non konsumen dan bagaimana membuka dunia mereka.

4) Melakukan rangkaian Strategis

Rangkaian strategis berfungsi memastikan kesinambungan komersilnya dan mengurangi resiko dari model bisnis yang diterapkannya. Titik awal dari rangkain ini adalah utilitas istimewa yang dimiliki, menetapkan harga strategik yang tepat, memastikan laba strategis dan menghadapi rintangan-rintangan pengadopsian dalam menggulirkan ide *Blue Ocean* tersebut. Dengan

rangkaian ini seorang manajer memastikan ide *Blue Ocean* Tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

5) Mengatasi Hambatan-hambatan Organisasi

Strategi *Blue Ocean* membimbing langkah seorang manajer untuk meninggalkan status quo perusahaan yang dilandaskan pada pergeseran dari konvergensi ke divergensi dalam kurva nilai dengan biaya rendah. Seorang manajer dihadapkan pada empat rintangan organisasi yaitu menyadarkan karyawan akan pentingnya perpindahan strategis (rintangan kognitif), keterbatasan sumber daya, motivasi, dan rintangan politis.

New Public Management Strategy

Kehadiran paradigma *New Public Management* diproyeksikan dapat memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan sektor publik. *New Public Management* menawarkan gagasannya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan transformasi spirit kinerja sektor swasta yang mengutamakan nilai efektivitas dan efisiensi. Untuk menerapkan berbagai macam strategi bisnis termasuk *blue ocean*, dibutuhkan dukungan dari birokrasi di suatu negara. Saat ini *New Publik Management* mengharuskan birokrasi melakukan transformasi kebijakan salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Bahkan peraturan kementrian di bidang pendidikan pun saat ini mengarah pada penguasaan di bidang teknologi informasi. Sehingga, Kebutuhan untuk melakukan transformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan adalah sebuah keniscayaan bagi perusahaan dan setiap individu untuk meningkatkan daya saing serta dukungan organisasi maupun birokrasi yang solid untuk menyesuaikan diri di abad ke-21.

Konsep *New Public Management* (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Perdebatan tentang kinerja administrasi publik di seluruh dunia selalu ditandai dengan ketidakpuasan. Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasional pun tidak bisa dianggap sebagai berita yang menggembirakan, melainkan merupakan malapetaka dan bencana baru yang menakutkan (Suryono, 2002).

Good Governance telah menjadi kata kunci dalam perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka menuju perubahan dan pendayagunaan sistem administrasi negara dalam arti yang seluas-luasnya. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada paragraf 1 butir c menyebutkan pengertian pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyak permasalahan yang timbul, New Public Management (NPM) dianggap dapat berbuat banyak untuk melakukan perubahan perbaikan untuk menggoyang organisasi publik yang tidur serta melayani dirinya sendiri melalui ide-ide dari sektor privat (Mahmudi, 2003). *New Public Management* (NPM) mempunyai fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya, dalam artian bahwa NPM berusaha memperbaiki kinerja sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat guna meningkatkan kualitas layanan publik di era milenial.

Era *millennial* berbasis *digital application* dewasa ini menjadi isu utama dalam berbagai lini. Era digital adalah istilah yang di gunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott, Don (1997), yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi ke berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemrosesan informasi. Hal ini ditandai dengan adanya komponen ekonomi digital yaitu industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), aktivitas *e-commerce*, serta distribusi digital barang dan jasa.

Peneran New Public Management di era milenial merupakan salah satu cara untuk mereformasi kebijakan berbasis teknologi informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Mengikuti perkembangan dewasa ini, sistem birokrasi pun akan mengikuti perkembangan zaman, dimana sistem tersebut memudahkan pihak swasta maupun pemerintah untuk melakukan inovasi baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun politik.

Dorongan untuk menguasai teknologi melalui birokrasi salah satunya dapat kita lihat dari kurikulum pendidikan yang dikeluarkan oleh Menristekdikti yang memaparkan lima elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

- 1) Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek *data literacy*, *technological literacy* dan *human literacy*.
- 2) Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program *Cyber University*, seperti sistem perkuliahan *distance learning*, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. *Cyber University* ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
- 3) Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana

prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.

- 4) Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.
- 5) Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Menristekdikti adalah untuk menciptakan SDM yang mampu menguasai penggunaan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Transformasi sistem tradisional ke sistem modern membutuhkan penyesuaian dan strategi khusus bagaimana masyarakat mampu menyesuaikan dengan cepat. Salah satunya melalui pembaharuan sistem dan kurikulum dibidang pendidikan.

Saat ini pemerintah sangat mendukung dan mengapresiasi perkembangan teknologi di sektor ekonomi. Dengan semakin canggih teknologi yang digunakan maka kualitas yang diberikan kepada pelanggan maupun masyarakat secara umum akan terlayani dengan baik. Dimana dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi, biaya yang dibutuhkan dalam operasi bisnis jauh lebih rendah, serta kualitas yang diberikan kepada pelanggan jauh lebih efektif dan efisien. Berikut contoh transformasi penggunaan teknologi ekonomi di bidang kuliner:

- 1) Mesin vendor makanan berbasis *touchscreen*

Mesin Coca-Cola's Freestyle Soda Fountain yang dapat menghasilkan minuman dengan berbagai rasa sesuai keinginan hanya dengan satu mesin berbasis layar sentuh. Dari segi biaya, mesin ini memang tidak dapat dikatakan murah. Akan tetapi, kebutuhan masyarakat yang lebih bervariasi dari waktu ke waktu dapat mendorong daya jual produk dari mesin sehingga akan menutupi biaya pembelian mesin.

- 2) Pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet pc

Breadcrumb merupakan suatu aplikasi yang menyediakan tampilan visual dari meja, menu makanan dan bahan makanan yang digunakan, informasi pembayaran makanan, dan tiket pemesanan meja yang menggunakan perangkat berupa tablet pc. Aplikasi ini akan mengirim semua data yang dipesan pelanggan restoran langsung ke dapur sehingga akan mempermudah pelayanan dan mempercepat produksi makanan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan aplikasi ini berkisar antara \$99 hingga \$399 tanpa ada tambahan untuk setiap update aplikasi.

- 3) Tenaga penghasil biodiesel otomatis

Chico, perusahaan penghasil biodiesel menciptakan sebuah prosesor BioPro untuk menciptakan bahan bakar dengan menggunakan minyak bekas baik minyak hewani maupun nabati. Hal ini tidak hanya mengaplikasikan konsep eco-friendly melainkan juga mengurangi biaya untuk menggunakan peralatan masak seperti alat penggorengan khususnya dalam restoran siap saji. BioPro 190 merupakan prosesor yang berharga \$9,995 merupakan prosesor dengan harga dan kapasitas terendah yang dapat digunakan untuk investasi restoran.

- 4) LED Alert Systems

Berbagai karyawan yang berbeda bahasa dan kesibukan di dapur restoran dapat membingungkan karyawan dalam bekerja. Dengan adanya Power Soak's Silent Alert System produksi Kansas City, Mo., karyawan dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menggunakan beberapa peralatan masak dengan adanya sinar yang akan menyala, misalnya sistem akan memberitahukan karyawan untuk tugas-tugas yang didasarkan pada waktu seperti kapan panci telah dicuci dan siap untuk digunakan kembali.

5) Pemantauan menggunakan webcam

Vision Enabled Training, sebuah sistem produksi Elmwood Park, dapat merekam kerja karyawan dalam persiapan makanan dan berbagai area lain untuk mendeteksi apakah ada pelanggaran terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Percobaan terhadap sistem ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanda pengenalan karyawan yang dilengkapi alat transmisi untuk memberitahukan sistem apakah karyawan menggunakan sarung tangan ketika menyiapkan makanan atau tidak. Hal ini penting bagi pihak manajemen untuk memutuskan kapan pelatihan pelayanan diperlukan.

Contoh di atas hanya sebagian kecil dari transformasi kebijakan dan revolusi industri 4.0. masih banyak contoh lainnya di berbagai aspek kehidupan. Hal ini dibenarkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Memandang Fenomena Disrupsi dan Revolusi Industri 4.0 dari Perspektif Postmodern

Disrupsi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Agar bisa bertahan, organisasi harus berubah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pekerja. Di satu sisi, disrupsi berpotensi menghapus pekerjaan lama. Tetapi di sisi lain, disrupsi juga memunculkan kebutuhan akan keahlian baru. Disrupsi harus dilihat sebagai tantangan dan bukan halangan. Di saat banyak bidang pekerjaan hilang, pada saat bersamaan kita juga menyaksikan bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Disrupsi memang memberi tempat kepada teknologi, robotik, dan kecerdasan buatan untuk menggantikan manusia. Tapi ini bukan berarti kemudian pekerjaan manusia menjadi terkikis, Yang berubah adalah jenis-jenis pekerjaan dan keahlian baru. Jika pekerja bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, tidak ada alasan untuk takut dengan disrupsi teknologi.

Namun, yang menjadi fenomena langka dalam era milenial adalah keberadaan prinsip etika dan moral setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai religius lambat laun akan semakin pudar bahkan terhapuskan dari dunia digital saat ini. Di bidang pendidikan melalui New Publik Management, Menristekdikti mengeluarkan peraturan ataupun kurikulum yang menunjang peserta didik untuk menguasai teknologi baru, namun terkait etika dan nilai-nilai religius tidak di singgung sama sekali. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat kejahatan dan krisis moral saat ini semakin merajalalela.

Ilmu pengetahuan pada dasarnya dapat membangkitkan kesadaran manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran emosi, spiritual, dan intelektual yang lebih tinggi (Triuwono, I, 2009: 215-220). Semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka seharusnya semakin sadar pulalah manusia akan kebesaran Sang Pencipta. Namun pada kenyataannya saat ini, manusia semakin lupa dan semakin diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Melalui pendidikan, etika dan nilai-nilai religius

seharusnya dapat ditanamkan dengan baik. Mengingat kebutuhan akan krisis moral yang melanda saat ini, seharusnya pemerintah maupun masyarakat secara umum sadar akan pentingnya pendidikan berbasis etika dan moral, serta nilai-nilai religius.

IV. PENUTUP

Disrupsi akan menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi siapapun, karena dunia telah berubah dari berbagai sisi yang dipengaruhi oleh revolusi teknologi, generasi (manusia) baru dan kebutuhan akan kecepatan yang luar biasa. Bagi masyarakat yang merayakan perubahan, disrupsi adalah masa depan. Namun, bagi mereka yang sudah nyaman dengan keadaan sekarang dan takut dengan perubahan, mereka akan berpikir bahwa ini adalah awal dari kepunahan. Disrupsi tidak bisa dihindari. Agar bisa bertahan, organisasi harus berubah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pekerja. Di satu sisi, disrupsi berpotensi menghapus pekerjaan lama. Tetapi di sisi lain, disrupsi juga memunculkan kebutuhan akan keahlian baru.

Blue Ocean Strategy merupakan strategi dunia bisnis yang *Blue Ocean Strateg* mengajarkan bagaimana sebuah lembaga/perusahaan keluar dari persaingan dengan menciptakan inovasi nilai dan menjadikan persaingan tidak lagi relevan. Menciptakan *Ble Ocean* berpijak pada inovasi nilai, yaitu upaya mengejar diferensiasi sekaligus menekan biaya serendah mungkin secara bersamaan. Dengan inovasi nilai, perusahaan tidak berfokus lagi untuk memenangkan persaingan, bahkan membuat persaingan antar perusahaan menjadi tidak relevan.

New Public Management menawarkan gagasannya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan transformasi spirit kinerja sektor swasta yang mengutamakan nilai efektivitas dan efisiensi. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Ilmu pengetahuan pada dasarnya dapat membangkitkan kesadaran manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran emosi, spiritual, dan intelektual yang lebih tinggi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka seharusnya semakin sadar pulalah manusia akan kebesaran Sang Pencipta. Namun pada kenyataannya saat ini, manusia semakin lupa dan semakin diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Melalui pendidikan, etika dan nilai-nilai religius seharusnya dapat ditanamkan dengan baik. Mengingat kebutuhan akan krisis moral yang melanda saat ini, seharusnya pemerintah maupun masyarakat secara umum sadar akan pentingnya pendidikan berbasis etika dan moral, serta nilai-nilai religius.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. 2018. Penerapan Blue Ocean Strategy (BOS) Dalam Usaha Memasuki Pasar Internasional. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 61. No. 2.
- Chan Kim & Renee Maubourgne. 2010. *Strategi Samudra Biru*. Jakarta: Serambi.
- Chwastiak, M. & Young, J. Y. 2003. *Silences in Annual Reports, Critical Perspectives on Accounting*. Vol 14, pp. 533-552.

- Fauzi, A & Kurniati, R. (2006). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 18. No. 1.
- Garza-Reyes, J. A. (2015). Lean and green – a systematic review of the state of the art literature. *Journal of Cleaner Production*, 102, 18-29. doi:10.1016/j.jclepro.2015.04.064.
- Hines, D. Ruth. 1992. *Accounting Filling The Negative Space. Accounting, Organization, and Society*. Vol.17.
- Levy, et al. 2003. Critical Approaches to Strategic Management. *Critical Management Studies Vol 14*. pp. 92-110.
- Mahmudi. 2003. *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. Journal Akuntansi & Manajemen*. Vol. 6. No. 1.
- Resnick, D. 1998. Politics on the Internet: The Normalization of Cyberspace. In C. Toulouse & W. T. Luke (Eds.), *The politics of cyberspace*. New York: Routledge.
- Rhenald Kasali. 2017. *Self Disruption*. Jakarta: Mizan.
- Suryono. 2002. Pentingnya Manajemen Birokrasi Profesional untuk Mengatasi Kemunduran Birokrasi dalam Pelayanan Publik. *Artikel Fakultas Ilmu Administrasi*. Universitas Brawijaya.
- Sugiri. 2009. Sebuah Catatan Penerapan New Public Management di Indonesia. (Bag Keuangan-bppk.net/category/artikel/keuangan-negara). (Online), diakses tanggal 8 Desember 2018.
- Triyuwono, I. 2009. *Perpektif, Metodologi, dan Teori. Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tapscott, Don. 1997. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-063342-8